



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNIT KERJA : BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NANIK SUDARYATI**
2. Jabatan : **WAKIL KEPALA BADAN**
3. NHK : **994414**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.402.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/80 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 237 m²/320 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m²/306 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 219 m²/400 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 328.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m²/800 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m²/204 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 163.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 705.000.000**

1. MOBIL, BMW 520I CKD A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000



2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 65.000.000

3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.7 LUX A/T Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 196.290.605

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.303.290.605

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.303.290.605

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.